

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

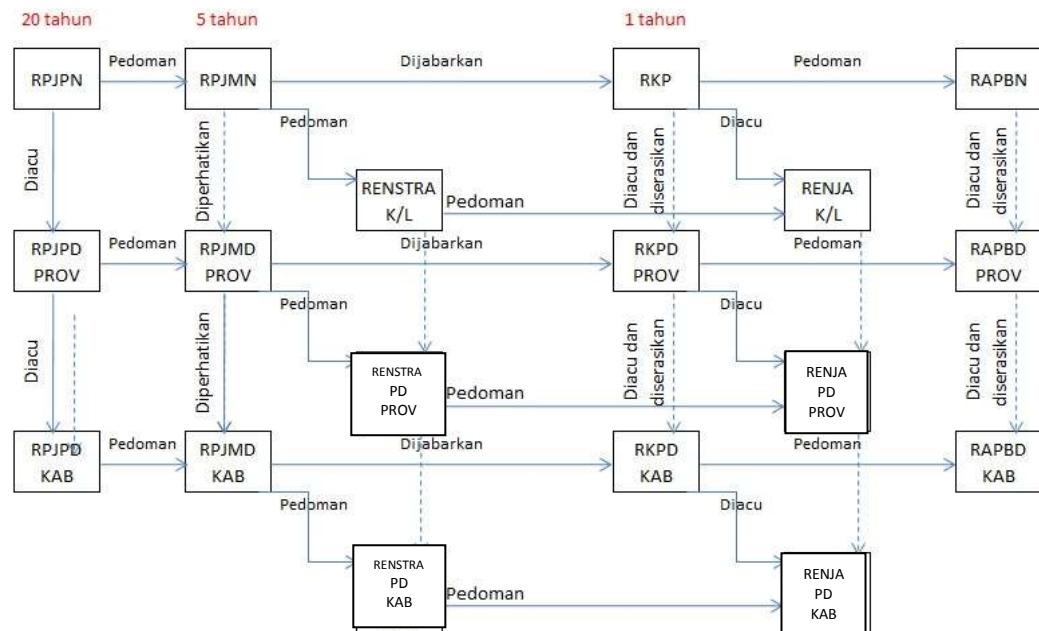
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2021 yang merupakan indikasi tahun ketiga RPJMD Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan BPPKAD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun 2019;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lain terkait pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung

**b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun 2019;**

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
  - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
  - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung
  - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

**c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung;**

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

**e. Review terhadap rancangan awal RKPD;**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Rancangan Awal Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun 2021.

**g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu

penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian Dokumen Rancangan awal Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung**

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung;**

Penyempurnaan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

**n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.**

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

**o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.**

Dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

**p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD.**

Dokumen rancangan akhir Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2019**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD  
Tahun 2019 dan capaian Renstra BPPKAD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja BPPKAD
- 3.3 Inovasi BPPKAD

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD**

- 4.1 Program dan kegiatan

##### **BAB V. PENUTUP**

- 5.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindaklanjut

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2019**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung**

Evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2019 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
  - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
  - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung
  - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung  
& Capaian Renstra s.d Tahun 2019

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019*+		Capaian s/d 2019		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	26	4.999.308.899	13	3.456.544.127	4.999.308.899	13	6.597.956.790	100	83,00	39	4.938.308.899			
b.	TPP	Terbayarnya tambahan penghalian pegawai	bulan	5	100.000.000.000	1	1.044.635.067	1	2.201.321.100	11.087.965	1		100	90	90	1.044.635.067			
c.	Insentif pemungutan pajak		triwulan	20	3.412.123.200	4	1.561.520.000	4	2.500.875.100	1.564.191.195			100	90	90	1.561.520.000			
	Total Program																		
<b>Belanja Langsung</b>																			
A	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>																		
1	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENDATAAN DAN PELAYANAN</b>																		
1	Pendataan massal SISMIOP obyek/subyek PBB-P2	Pendataan massal SISMIOP obyek/subyek PBB-P2	kec/desa	100	0	0	654.753.400	20	666.252.800	666.252.800	105	481.998.000	20	100	75	459.738.882	94	94	

2	Percepatan pemasukan PBB & intensifikasi pajak daerah	Terlaksananya pendataan WP pajak daerah	wp	1330	641.064.970	266	199.632.473	266	241.470.000	241.470.000	266	118.603.387	78	100	78	388.840.080	98	98	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA &amp; PENETAPAN PENDAPATAN</b>																			
1	Pemutakhiran data wajib pajak daerah	Tersedianya Pemutakhiran data wajib pajak daerah	kec/desa	100	0	0	0		151.700.000	151.700.000		51.269.250							
2	Percetakan SPPT PBB-P2	tercetakan SPPT PBB-P2	kec/desa	100	0	0	0		164.408.800	164.408.800		158.389.803							
3	Pengelolaan administrasi pajak daerah	Pengelolaan administrasi pajak daerah	kec/desa	100	343.348.420	20	184.623.070	20	181.674.900	181.674.900	20	87.250.509	95	100	95	341.903.094	95	95	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH</b>																			
1	Monitoring & evaluasi PAD	Terlaksananya monev PAD	OPD	40	30.000.000	10	53.737.564	14	60.908.900	60.908.900	10	30.695.792	98	100	98	104.820.000	98	98	
2	Penelusuran, penagihan dan penanganan	Penelusuran, penagihan dan penanganan	kec/desa	100	38.000.000	20	38.133.250	20	31.437.500	31.437.500	20	18.768.000	84	100	90	31.844.641	90	90	

	permasalahan pajak daerah	permasalahan pajak daerah																	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																		
1	Penyusunan KUA & PPAS	Tersusunnya KUA & PPAS	dokumen	20	75.000.000	4	113.465.500	4	128.704.800	128.704.800	4	61.765.000	100	54	24	166.408.500	98	98	
2	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersedianya SIKD	aplikasi	5	25.000.000	1	379.349.284	5	150.000.000	150.000000	5	0	98	100	98	134.620.000	98	98	
3	Pengelolaan Gaji	Tersedianya daftar gaji bg PNS se Kab. Temanggung	OPD	130	210.000.000	26	197.500.800	26	178.755.850	178.755.850	26	82.355.401	97	100	97	95.925.545	98	98	
4	Penelitian RKA & pengesahan DPA	Terlaksananya DPA yg telah diverifikasi	OPD	525	5.000.000	105	45.768.000	105	90.7569.800	90.7569.800	105	5.715.000	36	100	80	31.191.250	80	80	
5	Penyusunan APBD kab. Tmg	Tersedianya APBD	Perda & perbup	20	775.000.000	8	787.453.327	8	831.728.100	831.728.100	4	377.571.531	98	100	98	712.540.970	98	100	
6	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja non PNS (bg PTT dan tenaga Kontrak	Tersedianya jaminan sosial tenaga kerja non PNS (bg PTT dan Tenaga Kontrak)	OPD		450.000.000	26	66.972.401	26	86.250.000	86.250.000	26	48.307.955	32	32	32	74.976.764	85	85	

7	Fasilitasi bidang penganggaran & perbendaharaan	Fasilitasi bidang penganggaran & perbendaharaan	PD	47	0	47	0		34.465.000										
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASET</b>																			
1.	Kegiatan Pensertifikatan tanah pemerintah daerah	tersertifikatnya tanah pemda	dokumen	-	0	-	40.679.040	75	93.726.000	93.726.000	75	16.464.413	100	40,68	125	68.047.140	250	68	
2	Pengelolaan barang milik daerah	tertibnya penatausahaan barang milik daerah	OPD	525	350.000.000	105	74.564.053	105	156.049.500	156.049.500	105	76.527.112	75	100	75	118.161.293	75	75	
3	Pembinaan pejabat pengurus barang	Terbinanya pejabat pengurus barang	OPD	525	175.000.000	105	317.777.500	105	228.989.400	228.989.400	105	1.920.000	95	100	95	285.406.000	98	98	
4	Penatausahaan barang milik daerah	Penatausahaan barang milik daerah	OPD	525	160.000.000	105	0	105	49.756.000	49.756.000	105	42.399.500	45	45	45	33.572.200	65	65	
5	Pemberdayaan barang milik daerah	Pemberdayaan barang milik daerah	OPD	5	25.000.000	1	50.445.000	1	162.266.000	162.266.000	1	43.131.438	98	98	98	19.543.500	98	98	





b	Penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen rencana, perubahan renja, RKA, R KPA, DPA, DP PA	dokumen	126	1.700.000	101	2.915.000	24	4.985.900	4.985.900	24	1.968.200	100	83	100	4.415.000	100	100	
<b>3</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	bulan	60	102.900.000	12	196.555.372	12	300.000.000	300.000.000	12	129.890.287	100	85	85	428.277.786	40	92	
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	bulan	60	87.000.000	12	119.043.435	12	21.595.500	21.595.500	12	10.070.300	90	90	90	244.390.268	98	98	
c	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	bulan	60	30.000.000	12	25.884.250	12	29.999.200	29.999.200	12	13.436.500	80	80	80	58.544.750	98	98	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	bulan	60	37.000.000	12	16.951.100	12	49.904.800	49.904.800	12	26.700.750	100	84	24	39.589.522	90	90	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	bulan	60	4.000.000	12	16.831.500	12	29.997.800	29.997.800	12	833.000	100	84	56	21.088.500	100	100	
d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Meningkatnya pengetahuan	bulan	60	2.900.000	12	2.136.000	12	2.520.000	2.520.000	12	1.602.000	75	75	75	4482.000	95	95	



	APARATUR																		
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	bulan	60	100.000.000	12	219.700.460	12	116.176.590	116.176.590	12	52.120.500	100	57	57	495.111.250	98	98	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	bulan	60	129.000.000	12	103.465.500		58.000.000	58.000.000		12.871.000	100	94	35	212.465.500	40	19,5	
b	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	25.000.000	12	148.542.500	12	66.292.150	66.292.150	12	13.880.500	100	86	86	173.996.500	87	87	
c	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian suku cadang, pembelian BBM, pembayaran STNK	bulan	60	130.000.000	12	108.615.290	12	129.988.000	129.988.000	12	77.476.278	86	86	86	107.639.579	98	98	
d	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer,	bulan	60	0.000.000	12	22.593.800	12	50.000.000	50.000.000	12	9.280.000	64	64	64	25.422.500	93	93	
e	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan	Terpeliharanya lift &	bulan	60	9.000.000	12	8.374.000	12	50.000.000	50.000.000	12	26.177.000	64	64	64	4.800.000	76	76	

	gedung kantor	genset																	
f	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	Tersedianya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK	bulan	60	30.000.000	12	6.179.000	12	44.996.000	44.996.000	12	2.620.000	86	100	58	8.762.765	40	40	

## 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung.**

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung beserta target kerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.3  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung  
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2018 (%)	Status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD	%	26	25	25	25	25	15,00	15,00	15,00	22,00	15	100	S
2	Rasio Realisasi pendapatan asli daerah terhadap potensi pendapatan daerah	%	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	1,24	1,09	1,09	0,98	100	100	T
3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kreteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	T
4	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	9	9	9	9	9	13,11	14,46	16,76	17,26	17	100	T
5	Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD	%	68	68	70	75	80	68	68	75	77,38	77,70	100	T

Status capaian indikator kinerja daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 5 (Lima) indikator, yaitu:

1) Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD

- Faktor pendorong: efesiesi dalam menggunakan anggaran penatausahaan SKPD
- Faktor penghambat: Pelaksanaan tidak tepat waktu.

2) Rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap potensi pendapatan daerah

A. Faktor pendorong:

- kesadaran wajib pajak meningkat
- Diadakannya pendataan ulang terhadap obyek PBB sektor perkotaan
- Ada saksi yang tegas terhadap pihak yang tidak tertib bayar pajak

B. Faktor penghambat:

- Belum diketahui potensi PAD yang
- Banyak aturan yang sudah kadaluarsa

3) Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah

A. Faktor pendorong:

- Pembinaan pelaksanaan aplikasi penatausahaan dan aplikasi akuntansi PD untuk mendukung laporan keuangan yang benar dan tepat waktu

B. Faktor Penghambat:

- SDM dimasing-masing Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami akuntansi keuangan.

4) Rasio Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah

A. Faktor pendorong:

- kesadaran wajib pajak meningkat
- Diadakannya pendataan ulang terhadap obyek PBB sektor perkotaan
- Ada saksi yang tegas terhadap pihak yang tidak tertib bayar pajak

B. Faktor penghambat:

- Belum diketahui potensi PAD yang
- Banyak aturan yang sudah kadaluarsa



### 5) Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD

#### A. Faktor Pendukung:

- Monitoring & evaluasi terkait dengan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah dan aplikasi SIMBADA untuk mendukung laporan barang milik daerah yang akuntabel dan tepat waktu.

#### B. Faktor Penghambat:

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta penggunaan teknologi informasi yang belum optimal.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung**

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung, maka isu strategis BPPKAD adalah:

- a. Belum optimalnya kinerja pelaksana pengelolaan pendapatan, keuangan dan daerah

### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD BPPKAD Kabupaten Temanggung. Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel .2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG							
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					-		Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG							
1	KEUANGAN						1	PENDIDIKAN						
A.	Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah							Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah						
1	Pendataan Massal SISMIOP obyek/Subyek PBB-P2	Kab. Temanggung	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	280000	kegiatan	427.297.324	1.	Pendataan Massal SISMIOP obyek/Subyek PBB-P2	Kab. Temanggung	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	280000	kegiatan	513.143.000	
			Peta digitasi obyek pajak (blok0)	1	unit					Peta digitasi obyek pajak (blok0)	1	unit		
2	Percepatan Pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Kab. Temanggung	Terverifikasi perubahan data PBB-P2	10000		372.702.676	2	Percepatan Pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Kab. Temanggung	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	10000		384.275.160	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	15	peta					Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	15	peta		
			Terlaksananya pendataan/penilaian INDIVIDUAL SUBYEK/OBYEK khusus PBB	5	OP					Terlaksananya pendataan/penilaian INDIVIDUAL SUBYEK/OBYEK khusus PBB	5	OP		
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah</b>						<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah</b>						
1	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah dan Pengelolaan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Kab.Tmg	Terakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	10000	op	115.000.000	2	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah dan Pengelolaan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Kab.Tmg	Terakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	10000	sppt	150.000.000	
			Terbangunnya SI MANAJEMEN PBB	1	Sim PBB					Terbangunnya SI MANAJEMEN PBB	1	Sim PBB		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Percetakan SPPT PBB-P2	Kab.Tmg	Tercetaknya SPPT PBB-P2	5850000	sppt	170.000.000	2	Percetakan SPPT PBB-P2	Kab.Tmg	Tercetaknya SPPT PBB-P2	5850000	sppt	150.000.000	
			Tercetak nya DHKP	289	DHKP					Tercetak nya DHKP	289	DHKP		
			Tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal	125	box					Tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal	125	box		
3	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Kab.Tmg	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah	35	Pajak daerah	120.000.000	4	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Kab.Tmg	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah	35	Pajak daerah	200.000.000	
			Tersedianya SKPD & SKPDKB	1800	SKPD &SKPDKB					Tersedianya SKPD & SKPDKB	1800	SKPD &SKPDK B		
C	<b>Program Peningkatan Pendapatan Daerah</b>						3	<b>Program Peningkatan Pendapatan Daerah</b>						
6	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli	Kab.Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring &	60	bulan	65.000.000	6	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli	Kab.Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring &	60	bulan	65.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Daerah		evaluasi PAD					Daerah		evaluasi PAD				
7	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Kab.Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	60	bulan	35.000.000	7	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Kab.Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	60	bulan	41.000.000	
D	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						4	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
1	Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	48	dokumen	165.000.000	1	Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	48	dokumen	150.000.000	
2	Penyusunan Sistem informasi Keuangan Daerah	Kab.Tmg	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	48	aplikasi	90.000.000	2	Penyusunan Sistem informasi Keuangan Daerah	Kab.Tmg	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	48	aplikasi	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Pengelolaan Administrasi Gaji	Kab.Tmg	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	37.500	Asn/orang	220.000.000	3	Pengelolaan Administrasi Gaji	Kab.Tmg	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	37.500	Asn/orang	220.000.000	
4	Penelitian RKA dan Pengesahan DPA	Kab.Tmg	Terlaksananya penelitian RKA,, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA , DPPA	48.000	dokumen	110.000.000	4	Penelitian RKA dan Pengesahan DPA	Kab.Tmg	Terlaksananya penelitian RKA,, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA , DPPA	48.000	dokumen	100.000.000	
5	Penyusunan APBD Kabupaten Temanggung	Kab.Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	12	bulan	708.000.000	5	Penyusunan APBD Kabupaten Temanggung	Kab.Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	12	bulan	820.000.000	
6	penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	Kab.Tmg	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	200	Asn/orang	90.000.000	6	penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	Kab.Tmg	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	200	Asn/orang	78.297.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
7	Fasilitasi Bidang penganggaran dan perbendaharaan	Kab.Tmg	Terlaksananya fasilitasi penyusunan anggaran dan penatausahaa	405	Unit kerja	88.000.000	7	Fasilitasi Bidang penganggaran dan perbendaharaan	Kab.Tmg	Terlaksananya fasilitasi penyusunan anggaran dan penatausahaan	405	Unit kerja	50.000.000	
8	Penyusunan analisis standar belanja (lanjutan)	Ka.tmg	Tersedianya standar belanja	25	DOKUMEN	220.000.000	8	Penyusunan analisis standar belanja (lanjutan)	Ka.tmg	Tersedianya standar belanja	25	DOKUME N	200.000.000	
E	<b>Program Pengelolaan Aset</b>						5	<b>Program Pengelolaan Aset</b>						
1	Pensertifikatan Tanah	Kab.Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	45	Bidang	104.500.000	1	Pensertifikatan Tanah	Kab.Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	45	Bidang	95.000.000	
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	168	unit kerja	181.500.000	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	168	unit kerja	165.000.000	
3	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	Kab.Tmg	Terwujudnya penatausahaa n barang milik daerah	168	unit kerja	301.500.000	3	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	Kab.Tmg	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	168	unit kerja	350.000.000	



RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang	168	unit kerja					Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang	168	unit kerja		
			Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	168	unit kerja					Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	168	unit kerja		
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Temanggung	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	168	unit kerja	55.000.000	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Temanggung	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	168	unit kerja	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Pemberdayaan barang milik daerah	Kab.tmg	Terlasananya pemanfaatan bmd dan pemindahtangan bmd dan tercapainya target PAD dan sewa tanah bengkok	3441	Tanah/bangunan	192.500.000	5	Pemberdayaan barang milik daerah	Kab.tmg	Terlasananya pemanfaatan bmd dan pemindahtangan bmd dan tercapainya target PAD dan sewa tanah bengkok	3441	Tanah/bangunan	170.000.000	
i	<b>Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						6	<b>Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab.Temanggung	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	168	Unit kerja	2.062.000.000	1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab.Temanggung	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	168	Unit kerja	2.078.000.000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab.Temanggung	Tersedianya laporan keuangan daerah	1	dokumen	88.000.000	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab.Temanggung	Tersedianya laporan keuangan daerah	1	dokumen	80.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2020							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	105	unit kerja					Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	105	unit kerja		
3	Assistensi Penyusunan Laporan Keuangan	Kab.Teman ggung	pelaporan keungan perangkat daerah yang akuntable	105	Unit kerja	88.000.000	3	Assistensi Penyusunan Laporan Keuangan	Kab.Tem anggung	pelaporan keungan perangkat daerah yang akuntable	105	Unit kerja	88.000.000	

Sumber : Usulan RKPD BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :
  - a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan asistensi penyusunan laporan keuangan

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.5  
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	<b>NIHIL</b>				

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

BPPKAD Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dari urusan Pemerintahan adalah:

Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan akuntabilitas aset daerah

Adapun sasaran dari urusan pemerintahan adalah:

1. Perencanaan, pendapatan dan pelayanan;
2. Pengelolaan data & penetapan pendapatan;
3. Penagihan dan pengendalian;
4. Penganggaran dan perbendaharaan
5. Pengelolaan Aset;
6. Akuntansi & pelaporan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas. BPPKAD Kab. Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran  
Pada BPPKAD Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2019	TARGET KONDISI AKHIR 2018
Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan akuntabilitas aset daerah	Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun	%	25	25
	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap potensi pendapatan daerah	%	0,87	0,87
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kriteria	WTP	WTP
		Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	9	9
	Meningkatnya tertib administrasi aset	Presentase tertib administrasi aset daerah di SKPD		80	80

### 3.3. Inovasi Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung

#### 1 Inovasi Sistem Informasi Geografis MAPATDA (SIG MAPATDA)

BPPKAD Kabupaten Temanggung berhasil meraih penghargaan atas inovasi dalam pengembangan Sistem Informasi Geografis Manajemen Pendapatan Daerah (SIG MAPATDA) Kabupaten Temanggung, penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Informasi Geoparsial dalam penghargaan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geoparsial (IG).

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (MAPATDA) mulai dirintis sejak akhir tahun 2015 atas inisiatif Kasubid Pengelolaan Data BPPKAD, Eka Budi Setiawan, aplikasi mapatda 2015- 2017, SI MAPATDA sendiri lahir dari berbagai permasalahan pengelolaan dan penatausahaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung.

Permasalahan tersebut antara lain:

#### ➤ Identifikasi Wajib Pajak

Permasalahan ini meliputi tidak terjawabnya pertanyaan seberapa banyaknya wajib pajak dikabupaten temanggung dan seberapa banyak obyek pajak ganga yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh wajib pajak yang sama. Untuk mengatasi hal tersebut dilaksanakan kerjasama pemanfaatan database kependudukan antara Disdukcapil dengan BPPKAD dalam sebuah pola integrasi database dalam konsep multidatabase, adapun

strategi yang digunakan adalah penggunaan NIK sebagai NPWPD, sedemikian sehingga kepemilikan/ penguasaan berikutnya oleh wajib pajak yang sama dalam tahun pajak yang sama dapat dengan mudah diidentifikasi dan progresifitas pengenaan pajak dapat diterapkan.

➤ Permasalahan Identifikasi Obyek Pajak

Permasalahan ini meliputi pemungutan pajak daerah yang tidak mempertimbangkan lokasi strategis obyek pajak. Untuk mengatasi hal tersebut dilaksanakan kerjasama pemanfaatan peta citra satelit plaider antara BAPPEDA dengan BPPKAD dengan pola penempatan citra satelit dalam aplikasi mapatda yang kemudian dikenal dengan data spasial Mapatda, Fitur spasial SI MAPATDA memberikan kemudahan dalam proses digitasi obyek pajak dalam layanan citra bahkan ketika dioperasikan oleh personil/operator yang tidak memiliki pengetahuan tentang pemetaan. Penempatan titik obyek pajak/digitasi obyek pajak layanan citra satelit online diyakini akan mempermudah proses pengambilan keputusan tentang pajak daerah dan akan memudahkan koordinasi antar OPD pemungut pendapatan daerah. Oleh karena itu BPPKAD mulai serius mengembangkan aplikasi MAPATDA dan Retribusi reklame DPU di tahun 2016.

Pengembangan aplikasi ini kemudian terkendala server layanan dan koneksi jaringan, karena menggunakan server lokal BPPKAD. Untuk penyempurnaan Aplikasi MAPATDA BPPKAD dan Retribusi Reklame DPU, maka BPPKAD bekerjasama dengan dinas Kominfo pada tahun 2017 dalam hal menempatkan Citra Satelit bersama (SIG Pajak Daerah) dan layanan aplikasi pada server dan jaringan yang dimiliki oleh Dinas Kominfo. Sejak kerjasama pemanfaatan server dan jaringan tersebut berjalan maka SI MAPATDA dapat dioperasikan dalam versi online dan dapat diakses darimanapun.

MAPATDA adalah digitasi obyek pajak reklame dalam citra yang digunakan sebagai media identifikasi dan koordinasi titik obyek yang telah berijin namun tidak dikenakan pajak, telah dikenakan pajak reklame namun tidak memiliki ijin pemasangan reklame, tidak berijin dan tidak membayar pajak reklame, serta telah habis masa tayangnya namun tidak dilaksanakan langkah penertiban. Karakter Informasi Geospasial yang dibangun di SIG MAPATDA BPPKAD Kabupaten Temanggung adalah seluruh obyek spasial yakni point, polygon, dan line bersifat dinamis sesuai dengan lingkup data pada seluruh atribut yang ada pada masing-masing obyek seperti masa ijin, masa pajak, dimensi, foto obyek dll.

Keunggulan inovasi yang dikembangkan oleh BPPKAD ini antara lain adalah mudahnya pengoperasian fasilitas digitasi, penyusunan line, dan polygon kendati operator yang mengoperasikannya tidak mempunyai pengetahuan

tentang pemetaan. Titik obyekpajak reklame dan pajak air tanah dapat dengan mudah terdigitasi dalam citra satelit dan kemudian dituangkan dalam layer sendiri. Memudahkan koordinasi karena hasil digitasi dapat diakses dengan mudah oleh DPUPKP dan SATPOL PP. Inovasi ini juga memungkinkan DPUPKP dalam menyusun sebuah kebijakan tata ruang yang dituangkan dalam peta bersama.

Dengan makin mudahnya akses dan pertukaran data terhadap informasi geospasial, proses pengambil keputusan saat berjalan dengan cepat dan tepat. Sehingga informasi geospasial yang sudah dihasilkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dalam tata kelola pemerintah secara maksimal.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Kab. Temanggung  
Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Prgram /Kegiatan	Indikator Kinerja Prgram/Kegiatan	Kinerja Tahun 2021						Alokasi Anggaran 2020	Perkiraan Maju Tahun 2022
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sum ber Dana		
	<b>BELANJA</b>						90.950.000.000,00	DAU	15.427.974.849	
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						90.950.000.000,00	DAU	6.126.774.849	
<b>A</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>						90.950.000.000,00	DAU	6.126.774.849	6.500.000.000
402.01.001	Belanja pegawai						5.450.000.000,00	DAU	3.357.209.689	
402.01.002	TPP						85.000.000.000,00	DAU	1.135.459.000	
402.01.003	Biaya pemungutan pajak daerah						2.100.000.000	DAU	1.634.106.160	
402.01.004	Penyediaan BPJS ketenagakerjaan PNS						2.710.000.000	DAU		
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						-			
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	BPPKAD		8,420	%				
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	BPPKAD		9,000	%				

402.01.001	Pendataan massal SismiOP obyek/subyek PBB-P2	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	Kab.temanggung	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	280000	OP	427.297.324,00	DAU	513.143.000.	620.903.030
		Peta digitasi objek pajak (blok)			1	unit				
402.01.002	Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi pajak daerah	terverifikasinya perubahan data PBB-P2	Kab.temanggung	terverifikasinya perubahan data PBB-P2	10000	SPPT	372.702.676,00	DAU	384.275.160,	464.972.944
		Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	Kab.temanggung	Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	15	jenis pajak				
		Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/obyek khusus PBB	Kab.temanggung	Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/obyek khusus PBB	5	OP				
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase Pematkhiran Obyek Pajak	BPPKAD		2,90	%				
		Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah tepat waktu	BPPKAD		100	%				
402.01.002	Pematkhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan SKPD	Termutakhirnya data wajib pajak dan data obyek pajak SPPT PBB-P2 secara bertahap	Kab.Temanggung	Termutakhirnya data wajib pajak dan data obyek pajak SPPT PBB-P2	11000	OP	115.000.000,00	DAU	150.000.000	181.500.000

				secara bertahap						
402.01.002	Pencetakan SPPT PBB-P2	Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak Massal	Kab.Temanggung	Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak Massal	585000	SPPT	170.000.000,00	DAU	200.000.000	242.000.000
				Tercetaknya DHKP		289				
				Tersedianya Blanko SPPT untuk cetak massal		125				
402.01.002	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak Daerah	Kab.Temanggung	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak Daerah	7	Pajak Daerah	120.000.000,00	DAU	200.000.000	242.000.000
				Tercetaknya Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar	1800	SKPD dan SKPDKB				
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	BPPKAD	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	90	%				

		Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	BPPKAD	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	90	%				
402.01.002	Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Kab.Temanggung	Presentase realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	12	Bulan	65.000.000,00	DAU	65.000.000,00	78.650.000
402.01.002	Penelusuran, Penagihan dan penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	Kab.Temanggung	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	12	Bulan	35.000.000,00	DAU	41.000.000	78.650.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>									
		Prosentase penyerapan anggaran	BPPKAD		93	%				
402.01.002	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	Kab, Temanggung	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	4	Dokumen	165.000.000,00	DAU	150.000.000	181.500.000
402.01.002	Penyusunan sistem Informasi keuangan daerah	Terlaksananya penyusunan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) secara online	Kab, Temanggung	Aplikasi penganggaran, SP2D dan SPM	4	Aplikasi	90.000.000,00	DAU	100.000.000	121.000.000

402.01.002	Pengelolaan Administrasi Gaji	Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji bagi PNS se Kab.Temanggung	Kab,Temanggung	cetak daftar gaji,mutasi gaji, penerbitan SKPP, rapelan Gaji	7450	orang/A SN	220.000.000,00	DAU	200.000.000	242.000.000
402.01.002	Penelitian RKA & pengesahan DPA	Terlaksananya penelitian RKA, DPA RKPA,DPPA & terlaksananya pengesahan DPA & DPPA	Kab,Temanggung	Terlaksananya penelitian RKA, DPA RKPA,DPPA & terlaksananya pengesahan DPA & DPPA	9600	Dokumen	110.000.000,00	DAU	100.000.000	121.000.000
402.01.002	Penyusunan APBD Kab.Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup ttg APBD kab. Temanggung	Kab,Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup ttg APBD kab. Temanggung	6	Dokumen	708.000.000,00	DAU	820.000.000	992.200.000
402.01.002	Penyediaan JAMSOSTEK non PNS (bagi PTT dan tenaga kerja)	Terlaksananya Penyediaan JAMSOSTEK non PNS (bg PTT & tenaga kerja)	Kab,Temanggung	BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan	35	orang/A SN	99.000.000,00	DAU	78.297.000	108.900.000
402.01.002	Fasilitasi Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan	terlaksananya Fasilitasi Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan	Kab,Temanggung		81	Unit kerja	88.000.000,00	DAU	80.000.000	96.800.000
404.04.009	PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (lanjutan)	Tersusunnya ANALISIS STANDAR BELANJA (lanjutan)	BPPKAD		25	dokumen	220.000.000	dau	200.000.000	242.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASET</b>	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset di	BPPKAD		84,52	%				

		Satuan Kerja								
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	BPPKAD		98,70	%				
402.01.002	Pensertifikatan Tanah	Terwujudnya tanah Pemda yang Bersertifikat	Kab.Temanggung	Tanah Pemda	45	Bidang	104.500.000,00	DAU	95.000.000	114.950.000
402.01.002	Pengelolaan barang milik daerah	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	Kab.Temanggung	Pengelolaan BMD yang tertib dan Akuntabel dan pemeliharaan SIMBADA	168	Unit kerja	181.500.000,00	DAU	165.000.000	199.650.000
		Terlaksananya asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah			1	Aplikasi				
402.01.002	Pembinaan Pejabat Pengurus barang	Terwujudnya penatausahaan brang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Kab.Temanggung	penatausahaan BMD yang tertib dan akuntabel	168	Unit kerja	301.500.000,00	DAU	350.000.000	423.500.000
		Terlaksananya pembinaan Pejabat/pembantu pejabat pengurus barang			168	unit kerja				
		Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu			168	unit kerja				





		Persentase Laporan keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	BPPKAD	Format Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	47	PD				
				Semua transaksi sudah diakuntansikan dan didukung data Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan						
				Telah dilaksanakan rekonsiliasi intern satuan penatausahaan SKPD dengan pihak terkait						
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan Perangkat Daerah	BPPKAD	Laporan Keuangan SKPD disusun dan disampaikan tepat waktu	47	PD				
402.01.002	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab.Temanggung	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	168	Unit kerja	2.062.000.000,00	DAU	2.078.000.000	2.541.000.000
402.01.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	prosentase ketepatan waktu pelaporan keuangan perangkat	Kab.Temanggung	prosentase ketepatan waktu	1	Dokumen	88.000.000,00	DAU	160.000.000	96.800.000



	PERKANTORAN									
402.01.002	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	BPPKAD	-	12	bulan	220.000.000	DAU	220.000.000	363.000.000
402.01.002	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	BPPKAD	-	12	bulan	175.000.000	DAU	175.000.000	242.000.000
402.01.002	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	BPPKAD	-	12	bulan	33.000.000	DAU	30.000.000	36.300.000
402.01.002	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy	BPPKAD	-	12	bulan	11.000.000	DAU	20.000.000	12.100.000
402.01.002	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	BPPKAD	-	12	bulan	16.500.000	DAU	15.000.000	18.150.000
402.01.002	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai, dengan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPPKAD	-	12	bulan	3.300.000	DAU	3.000.000	3.630.000
402.01.002	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	BPPKAD	-	12	bulan	93.500.000	DAU	80.000.000	102.850.000
402.01.002	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	BPPKAD	-	12	bulan	90.000.000	DAU	100.000.000	121.000.000

402.01.002	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	BPPKAD	-	12	bulan	5.500.000	DAU	5.000.000	6.050.000
402.01.002	Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya penjaga malam, lembur & tenaga outsourcing	BPPKAD	-	12	bulan	70.000.000	DAU	100.000.000	121.000.000
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	Tersedianya penjaga malam kantor	BPPKAD		12	bulan	126.000.000	DAU	126.000.000	126.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR</b>									
402.01.002	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPPKAD	Pembelian CCTV dan Rak arsip	12	bulan	100.000.000	DAU	250.000.000	302.500.000
402.01.002	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	BPPKAD	pembelian UPS, laptop dan printer	12	bulan	60.000.000	DAU	146.000.000	121.000.000
402.01.002	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	BPPKAD	-	12	bulan	27.000.000	DAU	140.000.000	30.250.000
402.01.002	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK	BPPKAD	-	12	bulan	108.700.000	DAU	150.000.000	157.300.000

402.01.002	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer,printer,	BPPKAD	-	12	bulan	55.000.000	DAU	50.000.000	60.500.000
402.01.002	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya lift & genset	BPPKAD	-	12	bulan	55.000.000	DAU	50.000.000	60.500.000
402.01.002	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	Tersedianya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK	BPPKAD	-	12	bulan	0	DAU	50.000.000	44.000.000



Temanggung, 7 Nopember 2019

KARALA BPPKAD  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. KRISTRI WIDODO, M.Si

Embina Utama Muda

NIP. 19661211 199403 1 005

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BPPKAD Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BPPKAD Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, Renja BPPKAD sebagai pedoman didalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:**

1. Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berisi perencanaan berbagi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya;
2. Seluruh pegawai BPPKAD berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Renja BPPKAD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana APBD Tahun 2021, Renja BPPKAD Tahun 2021 ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan;

4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun 2021, maka dilakukan pemantauan dan analisa terhadap penjabaran dan sinergisitas ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada bidang-bidang, serta kelanjutannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya.


### 1.2 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) BPPKAD selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BPPKAD. Untuk dapat dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPPKAD Tahun 2021 tentu dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja BPPKAD juga memberi umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 Nopember 2019


 KEPALA BPPKAD  
 KABUPATEN TEMANGGUNG,  
**Ir. KRISDI WIDODO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NID. 19661211 199403 1 005